

## PEMIKIRAN ISLAM DALAM BINGKAI PERGOLAKAN POLITIK SEKTARIAN

Arfan Nusi  
IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Abstrak:** Pemikiran Islam lahir dari proses pemahaman manusia. Dengan kata lain Islam didefenisikan, diciptakan, dihasilkan oleh muslim maupun non-muslim secara terus menerus. Tradisi rekonstruksi pemahaman Islam atau ijtihad di kalangan para Sahabat, Ulama klasik hingga Ulama modern mewarnai lembaran-lembaran khazanah pemikiran Islam hari ini. Pemikiran Islam juga lahir dari mereka yang memiliki pemahaman ideologi politik sektarian di mana agama diseret pada persoalan politik praktis dalam rangka memperkokoh kekuatan yang mereka bentuk. Pergolakan politik sektarian di Indonesia mengarah pada intoleransi, dan diskriminasi. Bahkan mengarah pada kebencian yang muncul dengan memegang sikap superioritas keagamaan pada kelompok sendiri atau memandang pihak lain seagama sebagai inferioritas di tengah perbedaan-perbedaan di antara para pemeluk agama yang sama. Meski semula sektarianisme berakar dalam aliran dan mazhab dalam agama, namun juga kemudian juga terkait dengan perbedaan dalam sosial, budaya, etnik, sejarah, dan politik. Berdasarkan hal di atas, tulisan ini akan memfokuskan diri pada pokok bahasan hubungan antara politik sektarian dan munculnya pemikiran keagamaan sepanjang sejarah kehidupan umat Islam.

**Kata kunci:** *Pemikiran Islam, Sektarianisme, Politik*

### Pendahuluan

Setiap orang ditakdirkan Tuhan memiliki akal pikiran yang diperuntukkan melahirkan gagasan, ide, dan cara pandang dalam membentuk peradaban. Dengan akal pikiran itu setiap kita memiliki kesempatan mengekspresikan gagasan atau menawarkannya kedalam denyut nadi historisitas kemanusiaan. Setiap olah pikir yang lahir dari setiap orang, dapat dipastikan akan melahirkan gagasan yang berbeda.

Perbedaan perspektif dari produk pemikiran setiap orang meramaikan dinamika kehidupan manusia, baik di level politik, sosial, budaya, bahkan agama sekalipun. Namun disisi lain sangat disayangkan jika perbedaan perspektif setiap orang melahirkan benturan yang tidak jarang berujung pada pengambilan peran dominasi kebenaran sementara menyisihkan peran orang lain. Hal itu terlihat jelas

pada setiap penganut agama, mestinya agama-nya yang bersumber dari wahyu Tuhan penting untuk menyadarkan diri dengan pemahaman yang jernih bahwa agama Tuhan itu berbeda dan harus dibedakan dengan ke-agama-an. Bahkan yang menonjol sekarang adalah menyeret agama dalam situasi politik sektarian, hingga berkesan seolah-olah agama meridhai model politik si A atau si B dengan mengesampingkan model politik orang lain yang berbeda suku dan agama.

Krisis negeri ini cenderung menjadi semakin ruwet justru ketika agama terlibat atau dilibatkan dalam arena politik. Jika politik sektarian memasuki wilayah keagamaan, maka akan menemui kesulitan untuk mengurai jalan keluar. Argumen yang selalu dilontarkan oleh mereka adalah pemenuhan ajaran Tuhan. Kesalahan kemudian dapat dicapai dengan tindakan anti kemanusiaan itu sendiri.<sup>1</sup> Klaim kemutlakan dan ketunggalan kebenaran keagamaan sering terlontar dalam setiap ekspektasi hajatan politik, baik itu Pemilu, Pilkada maupun Pilpres. Sebut saja hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta hari ini yang memalingkan perhatian publik, hingga menghabiskan energi baik dipihak pro maupun pihak kontra. Tidak sedikit realitas itu melahirkan pandangan yang berbeda hingga masing-masing ahli agama pengambil peran dalam menafsirkan Surat al-Maidah ayat 51. Kenapa surat al-Maidah ayat 51? karena surat tersebut dijadikan landasan sebagian kaum muslimin dalam memilih pemimpin. Hingga memancing sebagian kalangan muslimin yang lain untuk menafsirkan ulang surat itu.

Pergolakan politik sektarian dinegeri ini tidak jarang diikuti oleh pemahaman kalam klasik berstandar Khawarij.<sup>2</sup> Keterkaitan yang sangat kuat antara politik dan kalam/teologi, mengharuskan perasaan merebut negara dan mengislamkannya. Ini berasal dari keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan bahwa orang mesti masuk dalam Islam secara total.

---

<sup>1</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Kematian Syekh Siti Jenar, Konflik Elit dan Labirnya Mas Karebet*, Cet-24, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 20.

<sup>2</sup>Khawarij sebelumnya adalah pengikut barisan Ali bin Abi Talib yang meninggalkannya, karena persoalan politik yakni menerima *arbitrase* sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Mu'Awiyah Ibn Abi Sufyan. Sebenarnya gagasan Khawarij menghalalkan menumpahkan darah orang yang berbeda, bahkan klaim kebenaran bahwa hanya golongan Khawarij adalah golongan yang masuk surga, tidak lain berangkat dari persoalan politik, lihat Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 13. Lihat juga penjelasan Al Makin bahwa teologi termasuk di dalamnya teologi Khawarij lahir dalam konteks sejarah manusia; dipahami oleh manusia; dan juga dikembangkan oleh manusia. maka berbicara teologi meskipun itu ilmu tentang Tuhan, tidak bisa lepas dari peran manusia termasuk didalamnya masalah politik. Al Makin, *Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2016), hlm. 106.

Dengan demikian, negara ini mesti didasarkan atas dasar Islam dan orang perlu menyelenggarakan negara untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Islam.<sup>3</sup>

### **Pemikiran Islam dan Politik**

Islam adalah agama yang sejak awal diturunkan dan diterima serta diamalkan oleh masyarakat urban. Yakni masyarakat perkotaan Makkah dan Madinah. Masyarakat Islam awal sangat dinamis dan memiliki vitalitas yang tinggi. Islam memberikan kesan yang tidak dapat dilupakan yakni menciptakan revolusi yang hebat, tidak hanya dibidang agama tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Ia telah membalikkan seluruh kepercayaan dan ideologi-ideologi lama. Disisi lain Islam juga memberikan umat manusia sebuah sistem nilai baru dan memperkuat sensitivitas kemanusiaan untuk melakukan perubahan menuju kepada sesuatu yang lebih baik.<sup>4</sup>

Islam diterima oleh lapisan masyarakat yang mampu berfikir rasional dan logis yang tidak keluar dari petunjuk wahyu yang benar, bukan asal menerima begitu saja.<sup>5</sup> dengan kata lain Islam didefenisikan, diciptakan, dihasilkan oleh Muslim sendiri secara terus menerus.<sup>6</sup> Tradisi rekonstruksi pemahaman Islam atau ijtihad dikalangan para Sahabat, Tabi'in, Tabi'tabi'in, Ulama klasik hingga Ulama modern mewarnai lembaran-lembaran khazanah pemikiran Islam hari ini. Seolah tidak akan pernah berhenti hasil dari pemikiran Islam dalam merespon persoalan kemanusiaan selama pergulatan manusia dimuka bumi terus berjalan. Itu artinya selama manusia beragama masih menaruh perhatian atau kegelisahan akademiknya terhadap persoalan keberagamaan, maka selama itu pula gagasan pemikiran Islam tidak akan berhenti.

Penggunaan rasionalitas dalam memahami Islam sangat penting bagi Islam. Ketika Islam mengepakan sayapnya ke pusat-pusat budaya Bizantium, Persia dan India, ia mengalami dialektika dengan seluruh *mind set* yang berbeda-

---

<sup>3</sup>Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme dan Terorisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 111.

<sup>4</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Forstudia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 66.

<sup>5</sup>M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam, di Era Postmodernisme, Cet-4*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

<sup>6</sup>Yang dimaksud Islam disini yakni segala sesuatu yang diinterpretasikan, dilakukan, dihasilkan, diciptakan oleh Muslim sendiri. Tanpa pemeluk agama tidak akan hidup, Al Makin, *Anti Kesempurnaan: Membaca, Melibat, dan Bertutur tentang Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 19

beda di wilayah tersebut.<sup>7</sup> Itu sebabnya pemikiran Islam disebut lahir dari bangunan historisitas kekhalifahan. Meminjam kerangka pikir M. Amin Abdullah mestinya hasil dari pemikiran Islam yang ada selama ini diurai lebih jauh, dicermati, didialogkan, dan dikembangkan lebih lanjut dalam membangun budaya berfikir baru. Karena selama ini pemikiran Islam menurut M. Amin Abdullah terpolarisasi pada tiga pola pemikiran. *Pertama*, pola pemikiran Islam bersifat *absolutely absolute*. Pola pemikiran Islam seperti ini memandang bahwa perangkat agama sepenuhnya bertumpu pada unsur wahyu yang lebih dikedepankan dari pada akal. Sementara produk yang lahir dari akal rasional akan segera didiskualifikasi karena masuk dalam kategori bid'ah.<sup>8</sup> Pola pemikiran Islam seperti ini sangat rigid, kaku dan tidak mengenal kompromi, sehingga tidak jarang kita mendapati mereka<sup>9</sup> mengambil jarak sejauh mungkin dari campur tangan dan intervensi penganut agama lain. Pemahaman eksklusivitas teks dan makna ini disebut oleh Ali Harb akan menyeret pada penutupan penafsiran lain atau jenis pembacaan lain.<sup>10</sup>

*Kedua*, pola pemikiran Islam yang bersifat *absolutely relative*. Para tokoh pemikir ini mempunyai latar belakang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya mempunyai sedikit kecenderungan untuk berpendapat bahwa perilaku agama adalah identik dengan perilaku sosial dan budaya.<sup>11</sup> Pemikir ini menyimpulkan bahwa kebenaran agama itu adalah kebenaran relatif. Tidak dikenal dikalangan mereka<sup>12</sup> dimensi rohani dari agama-agama. Yang ada hanyalah dimensi lahiriah eksoterik.

*Ketiga*, pola pemikiran Islam *relatively absolute*. Cara pandang model pemikiran yang terbungkus dalam selimut kepercayaan dan keimanan dalam menata kehidupan beragama pada umumnya dan kehidupan beragama Islam pada

<sup>7</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini...*, hlm. 79.

<sup>8</sup>M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 82-83.

<sup>9</sup>“Mereka” yang dimaksud adalah para pemikir Islam yang disebut oleh Al-Jabiri masuk dalam kategori Bayani atau secara sederhana sebagai penjelasan berdasarkan teks. A Khudori Soleh, *Wacana Baru Filsafat Agama*, Cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 178.

<sup>10</sup>Ali Harb, *Nalar Kritis Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 67.

<sup>11</sup>M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, hlm.

<sup>12</sup>“Mereka” yang dimaksud adalah pengusung nalar Burhani yang mengandalkan rasionalitas murni. Cara berfikir cenderung spekulatif dengan mengabaikan dimensi pendekatan spritualitas maupun pendekatan teks. Lihat M. Amin Abdullah dalam kata pengantar Baedhowi, *Humanisme Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xxiv.

khususnya. Sikap dan pandangan keagamaan Islam ini memiliki dampak pada cara memandang orang lain, etnis, ras, suku dan agama berbeda.<sup>13</sup>

Tiga pola pemikiran ini tidak sulit ditemui dalam kehidupan keberagaman di negeri ini. Pengalaman di Indonesia, pengaruh Timur Tengah sangat kuat. Merasa semakin kuat kadar keislaman seseorang semakin kearab-araban penampilan lahiriahnya. Ukuran-ukuran kebaikan Arab seringkali menjadi acuan yang dipakai di bumi Nusantara yang memiliki latar belakang tradisi dan tabiat berbeda. Bahkan arabisasi seringkali dipaksakan dengan dalih bahwa tradisi arab merupakan seperangkat ajaran agama yang mesti dilaksanakan.

Nalar pemaksaan tradisi Arab juga seringkali terlihat pada konsep politik yang ditawarkan. Konsep syariah atau khilafah seringkali disuarakan diruang-ruang publik dengan dalih demokrasi tidak mampu merepresentasikan suara Tuhan dimuka bumi, demokrasi produk Barat, demokrasi bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Sikap seperti ini mendapat gugatan dari pro demokrasi bahwa demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa di mana semua lapisan masyarakat yang berlatar belakang agama, suku, etnis, ras ikut menyumbangkan kemerdekaan Indonesia.

Lebih jauh untuk memperlebar kajian pemikiran Islam dan politik terlebih dahulu didefinisikan apa itu politik?. Politik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani atau latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata *polis* yang berarti kota.<sup>14</sup> Sementara dalam pengertian lain merumuskan bahwa politik dari bahasa Arab yaitu *siyasah*. Kata ini terambil dari kata *sasa-yasusu* yang biasanya diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.<sup>15</sup>

Sepanjang sejarah Indonesia, Islam dipelihara fungsinya sebagai tolak ukur moralitas dan tingkah laku masyarakat. Ia memiliki sumbangan penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, bahkan menjadi alat legitimasi

---

<sup>13</sup>M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi...*, hlm. 86-88.

<sup>14</sup>John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 280.

<sup>15</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet-4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 416.

terhadap proses pembangunan politik, terutama terhadap masalah-masalah yang sangat prinsipil. Tanpa legitimasi dari Islam proses pembangunan politik pada umumnya tidak akan berjalan secara efektif.<sup>16</sup> Bila dibandingkan dengan proses politik dengan bangunan politik di banyak negara lain yang cenderung sekuler, namun di Indonesia bangunan politik itu tidak dapat mengabaikan orientasi keagamaan yang berlaku.<sup>17</sup>

Islam dengan demikian mempunyai peran yang penting dalam kehidupan politik negeri ini. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia pada akhir abad ke-13, Islam telah menjadi salah satu sumber dalam pembentukan nilai-nilai, norma-norma dan tingkah laku masyarakat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Islam berlaku sebagai suatu segi yang vokal bagi kesatuan nasional, dan merupakan faktor yang memelihara, mempertahankan dan menjadi simbol identitas dari proses terhadap pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam Islam sendiri antara agama dan politik diakui sebagai bagian dari ajaran Islam. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan slogan yang dapat mewakili bahwa Islam sebagai agama yang mengatur segala bentuk kebutuhan manusia dan memberikan jaminan kehidupan bahagia di akhirat termasuk mengatur politik. Politik sendiri diakui sebagai urusan besar bagi manusia karena politik adalah mediasi untuk mewujudkan dan menerapkan perintah Tuhan.<sup>18</sup>

Sejarah mencatat, tokoh, komunitas, dan institusi keagamaan bisa berperan menjadi penjaga moral masyarakat serta pengkritik kekuasaan yang dzalim. Pula, agama bisa menjadi sumber energi luar biasa untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup dan despotik. Sejarah gerakan Gereja Katolik di Amerika Latin, Black Churches di Amerika Serikat, Sufi Sanusiyah di Libya, atau Tarekat Qadiriyyah-Naqshabandiyah di Banten, Indonesia,<sup>19</sup> hanyalah sedikit contoh sejarah di mana agama telah melakukan fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial dalam masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan.

---

<sup>16</sup>Rahman Yasin, *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 6

<sup>17</sup>Masyukri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 20.

<sup>18</sup>Husni Idrus, *Islam Antara Agama dan Negara*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2015), hlm. 103.

<sup>19</sup>Yudi Junadi, *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 45

Penting untuk dicatat, bukan hanya agama yang melakukan perlawanan terhadap politik. Politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat dan dominan dari keduanya serta bagaimana watak dan karakter para elit politik dan elit agama yang kebetulan berkuasa. Jika politik menjadi superordinat, maka agama akan berpotensi menjadi subordinat. Begitu pula sebaliknya. Tetapi di sisi lain, agama juga bisa berfungsi sebagai stempel atau legitimator politik-kekuasaan sejak zaman dahulu hingga dewasa ini. Di sejumlah negara, dewasa ini agama dan politik banyak melakukan perkawinan dan menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi legitimasi teologis untuk melanggengkan kekuasaan politik.

Dalam konteks ini, secara teori, maka hubungan agama dan politik adalah sejajar (koordinat), bukan saling mendominasi dan menguasai tetapi saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain. Meskipun dalam prakteknya tentu saja tetap terjadi perselingkuhan sana-sini di mana agama atau politik mencoba main mata dan berselingkuh dengan pihak lain diluar komunitas agama (misalnya kelompok adat, kaum pebisnis, sekuler-ateis, dst) atau bahkan secara diam-diam saling menjegal dan mendelegitimasi otoritas masing-masing.<sup>20</sup> Diktum-diktum keagamaan (ajaran, diskursus, teks, norma dan lain sebagainya) memang sangat lentur dan fleksibel sehingga mudah untuk diseret-seret kesana kemari sesuai dengan kepentingan pemeluknya.

### **Agama dan Politik Sektarian**

Definisi politik sudah dijelaskan diatas, maka selanjutnya dijelaskan pengertian sektarianisme. Dalam pengertian kamus, 'sektarianisme' adalah "semangat atau fanatisme dan taklid berlebih-lebihan pada aliran atau mazhab khususnya dalam agama". Dalam konteks ini 'sektarianisme' dalam terminologi

---

<sup>20</sup>Imanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), hlm. 101.

Arab disebut sebagai ‘*ta’ashub*’ yang terkait dengan *ashabiyah*. Sektarianisme religio-politik lazim disebut sebagai *hizbiyah*.<sup>21</sup>

Sektarianisme juga merupakan istilah yang mengacu pada intoleransi, dan diskriminasi. Lebih gawat lagi, juga mengacu pada kebencian yang muncul dengan memegang sikap superioritas keagamaan pada kelompok sendiri atau memandang pihak lain seagama sebagai inferioritas di tengah perbedaan-perbedaan di antara para pemeluk agama yang sama. Meski semula sektarianisme berakar dalam aliran dan mazhab dalam agama, kemudian juga terkait dengan perbedaan dalam sosial, budaya, etnik, sejarah, dan politik. Keadaannya bisa menjadi kian runyam jika sektarianisme agama merasuk pada sektarianisme politik.

Belajar dari sejarah, teologi Islam terkait erat dengan politik. Perumusan ajaran keagamaan terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik. Anggapan bahwa Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara) merupakan konsekwensi logis dari perkembangan itu. Dalam keadaan ini, agama dan penyelenggaraan negara menyatu dan saling memasuki.

Tiga kelompok yang terkenal yakni Khawarij, Syi’ah dan Sunni diungkapkan Machasin bahwa kelompok teologi Islam tersebut terbentuk dengan latar belakang politik yang sangat mencolok.<sup>22</sup> Dapat disebut, bahwa pada dasarnya kelahiran kelompok itu adalah untuk memperebutkan kekuasaan. Karena ajaran-ajarannya merumuskan keabsahan diri kelompok sendiri dalam mendapat kewenangan memimpin. Artinya diberlakukan kekuatan pemaksa dalam memuluskan keinginan atau kepentingan kelompok tersebut.

Lebih jelasnya secara singkat penulis akan mengurai politik sektarian tiga kelompok tersebut. *Pertama*, Khawarij, yaitu sekelompok orang yang keluar dari barisan khalifah Ali bin Abi Thalib terkait peristiwa tahkim. Sikap politik mereka dalam peristiwa tersebut direpresentasikan melalui jargon *la hukma illa Allah* (hukum hanya milik Allah). Namun demikian, sekte Khawarij tidak bisa diandaikan hadir begitu saja dalam babakan sejarah Arab-Islam, banyak variabel

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 305.

<sup>22</sup>Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme dan Terorisme...*, hlm. 97-98.

dalam realitas sosio-kultural yang bisa menjelaskan pandangan politik dan watak pemahaman keagamaan mereka, khususnya terkait peristiwa tahkim.<sup>23</sup>

Khawarij tidak bisa diandaikan hadir begitu di kancah perpolitikan Arab-Islam. Terdapat banyak variabel sosial-kultural yang turut menopang pandangan politiknya, sekaligus berdampak serius pada polemik teologis di ruang pewartannya. Misalnya, doktrin takfir<sup>24</sup> yang acapkali digunakan untuk menjustifikasi siapapun yang berbeda sikap dan pandangan politik dengan mereka, merupakan konsekuensi praksis dari cara baca wacana keagamaan yang cenderung literalistik dan ahistoris. Maka dari itu, sekte Khawarij tengah merepresentasikan potret perselingkuhan antara kuasa dan wacana agama yang destruktif dan totaliter.

*Kedua*, Syi'ah. Syi'ah dilekatkan pada orang-orang Islam yang tidak membaiat Abu Bakar ketika peristiwa Saqifah karena meyakini Ali sebagai washi.<sup>25</sup> Dari peristiwa Saqifah diketahui tidak semua umat Islam setuju dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin. Selesai penguburan Nabi, Fathimah tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar selama enam bulan. Termasuk suaminya, Ali, beserta cucu Rasulullah SAW. Setelah wafat Fathimah, baru Ali memberikan baiat kepada Abu Bakar.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan...*, hlm. 15

<sup>24</sup>Istilah takfir perama kali dilakukan oleh sekte Khawarij dalam kaitannya dengan peristiwa tahkim. Mereka memandang bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin 'Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan semua orang yang terlibat dalam tahkim termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Berbaurnya wacana politik dengan doktrin agama menjadikan sekte Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan internal ini turut mempengaruhi perubahan konsep kafir. Yang dianggap kafir tidak lagi sebatas orang yang tidak menentukan hukum dengan al-Qur'an, tapi juga memasukan orang yang berbuat dosa besar (murtakib al-kabair). Persoalan ini menimbulkan tiga aliran diskursus teologi Islam (kalam), yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Muktazilah. Sekte Khawarij memandang bahwa orang yang berbuat dosa besar tergolong kafir. Sekte Murji'ah menegaskan bahwa orang tersebut masih dianggap mukmin, sedangkan balasannya diserahkan kepada Allah SWT. untuk mengampuninya atau tidak. Adapun sekte Muktazilah memandang orang yang berbuat dosa besar tidak dihukumi mukmin ataupun kafir. Posisi mereka berada diantara keduanya, atau dikenal sebagai doktrin *al-manzilah baina al-manzilatain* (posisi diantara dua posisi). lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa, dan Perbandingan...*, hlm. 7.

<sup>25</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Asal Usul Sunnah Sahabat: Studi Historiograf atas Tarikh Tasyri* (Desertasi di UIN Alauddin Makassar tahun 2014) menyatakan bahwa washi adalah pandangan politik kaum Syiah yang memegang konsep washaya (meyakini Nabi telah berwasiat). hlm. 101-102.

<sup>26</sup>Fahmi Farid Purnama, "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama", *Jurnal Al-A'raf Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 3. No. 2. Tahun 2016. hlm. 217.

Kaum Syi'ah meyakini konsepsi politik berasal bagian dari *ushuluddin*,<sup>27</sup> khususnya rukun imamah. Para ulama Syi'ah berdasarkan ajaran Islam memahami bahwa Allah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam agama Islam memilih utusan-Nya yang terpilih, Nabi Muhammad SAW, untuk membawa risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh umat manusia sampai menjelang Kiamat. Peran Nabi Muhammad SAW di dunia adalah pembawa syariat dan pembimbing umat manusia. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW maka agama Islam menjadi penutup hingga Kiamat. Meski pembawa ajaran agama Islam, tetapi risalah Ilahi berupa ajaran agama Islam tidak berakhir karena penyebaran dan bimbingan dalam agama dilanjutkan para Imam pilihan Rasulullah SAW dari Ahlulbait.

Para Imam diyakini sebagai orang suci (ma'shum) yang derajatnya di bawah Nabi. Imam menjadi penerus risalah Rasulullah SAW dalam menjelaskan agama kepada umat Islam<sup>28</sup> karena berkedudukan sebagai washi. Para Imam Syi'ah diyakini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan nash, dari Ali bin Abi Thalib yang bersambung kepada Al-Mahdi.<sup>29</sup> Dengan merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 124 bahwa para Imam Syi'ah adalah berasal dari geneologi Nabi Ibrahim AS melalui jalur Nabi Muhammad SAW turun kepada keturunan Fathimah az-Zahra.

*Ketiga*, Sunni. Sebagai kelompok mayoritas, ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Sunni klasik ditandai oleh pandangan mereka tentang hubungan yang integral antara agama dan negara, pandangan yang bersifat khalifah sentris yang mengharuskan rakyat tunduk dan patuh pada pemerintahnya, pengutamaan suku Quraisy sebagai kepala negara, penolakan terhadap oposisi dan sikap akomodatif terhadap kekuasaan. Pandangan tokoh-tokoh Sunni pada gilirannya membawa pada prinsip lebih mengutamakan keharmonisan dalam politik Islam. Mereka menganggap kepala negara sebagai sosok yang sentral dalam pemerintahan

---

<sup>27</sup>Akidah dalam mazhab Syiah didasarkan pada lima rukun: Tauhid, *Nubunwah*, Imamah, *al-Adl*, dan *al-Maad*. Menurut Ayatullah Naasir Makaarim Ash-Shirazi dalam *A Summary of Rulings: Zubdatul Ahkaam* (Qum-Iran, 1996) bahwa yang khas Syi'ah adalah Imamah dan *al-Adl*. Mazhab dalam Islam yang memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan serta masih tergolong dalam Islam: Syiah Zaidiyah, Syiah Jafariah/Imamiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Syafiyah, Ibadiyah, dan Zhahiri.

<sup>28</sup>Murtadha Muthahhari, *Tafsir Holistik: Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam* (Jakarta: Citra, 2012), hlm. 611-612.

<sup>29</sup>Ahmad Sahidin, "Memahami Sunni dan Syi'ah: Sejarah, Politik dan Ikhtilaf", *Jurnal Maarif, Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2015. hlm. 40-41.

Islam. Otoritasnya tidak boleh digugat dan perintahnya tidak boleh dibantah. Dalam batasbatas tertentu bahkan kepatuhan ini bersifat mutlak.<sup>30</sup>

### **Pergolakan Politik Sektarian di Indonesia**

Dalam konteks sejarah Indonesia, terjadi perkembangan dinamis menyangkut relasi agama dan politik ini. Dulu pada masa kolonial, agama berperan ganda: sebagai legitimasi kolonialisme sekaligus kritik sosial. Banyak tokoh agama, Muslim khususnya, yang bekerja dengan pemerintah kolonial. Tetapi pada saat yang bersamaan juga banyak di antara mereka yang menjadi pengkritik dan pemberontak kolonial.<sup>31</sup>

Pada zaman Orde Lama, Presiden Sukarno di satu sisi mengakomodasi tokoh-tokoh Muslim (khususnya dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) tetapi pada waktu yang bersamaan melibas tokoh-tokoh Muslim lain (khususnya dari Masyumi) yang kontra dengan kekuasaannya. Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto tidak melirik kelompok Islam meskipun pada awalnya mereka digandeng untuk mengantarkan jalan kekuasaan. Suharto lebih tertarik menggandeng kelompok abangan-kejawen dan kalangan militer. Baru pada awal 1990-an, ia tertarik “melirik” Islam dengan menggaet kelompok kelas menengah teknokrat di bawah bendera ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) setelah terjadi friksi dengan sejumlah petinggi militer. Suharto dulu juga tidak memberi ruang gerak sedikitpun untuk perkembangan Islam politik meskipun mendukung gerakan Islam kultural yang apolitis. Setelah Suharto tumbang pada 1998, keran kebebasan berekspresi dan berserikat yang dulu ditutup rapat, kini pun dibuka kembali lebar-lebar. Akibatnya, Indonesia seperti banjir kelompok-kelompok Islam ekstrim-konservatif.<sup>32</sup>

Benih-benih gerakan ormas Islam yang dulu bersembunyi karena ketakutan dengan politik otoriter-militer Suharto, kini bermunculan satu persatu. Meskipun banyak sisi positif-konstruktif di era post-Suharto ini seperti tumbuh-berkembangnya demokrasi dan kebebasan sipil tetapi ada sejumlah sisi negatif-

<sup>30</sup>Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: Macmillan Press, 1970), hlm. 191.

<sup>31</sup>Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 328.

<sup>32</sup>Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 303.

destruktif. Munculnya para penumpang gelap demokrasi seperti kelompok-kelompok Islam garis keras yang intoleran, anti-pluralisme, kontra-kebangsaan, mau menangnya sendiri, bebasnya mengkafirkan orang lain serta menggunakan berbagai tindakan dan cara kekerasan untuk memuluskan agenda dan kepentingan kelompoknya hanyalah beberapa contoh dari sisi negatif-destruktif diatas.

Kelompok-kelompok ini tidak segan-segan untuk memobilisasi massa dengan menggunakan sentimen-sentimen primordial agama dan etnisitas demi mencapai kepentingan politik-ekonomi pragmatis. Inilah yang penulis maksud sebagai politik agama, oleh sejumlah kelompok agama demi kepentingan politik praktis sektarian yang hari ini masih bergolak.

Masih hangat dibenak masyarakat Indonesia ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta karena pada saat itu Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI. Pengerahan massa oleh sejumlah ormas Islam ini bertujuan untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama dari Gubernur Jakarta dengan alasan bahwa ia seorang Kristen/China yang tidak layak memimpin Jakarta yang mayoritas Muslim. Bahkan berujung pada pengangkat Gubernur tandingan dari kalangan mereka sendiri adalah contoh kecil tapi mencolok dari politik agama dinegeri ini.

Aksi damai I, II hingga aksi 212 yang digelar di Bundaran HI, Monas dan Istana Negara berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Secara sukarela umat Islam seluruh penjuru negeri ini berkumpul di Jakarta menyuarakan aspirasi yang sama yakni penjarakan Ahok yang berstatus tersangka karena sebelumnya Ia diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Bagi penulis ada tiga hal yang menarik dari aksi damai yang baru saja digelar. *Pertama*, dengan seruan membela agama persatuan kaum muslimin diseluruh penjuru negeri ini masih terjaga, sungguh ini aksi yang sangat luar biasa jumlah masanya jika dibandingkan aksi tahun 1998 menjatuhkan Soharjo. *Kedua*, aksi masa yang begitu heroik, sayangnya oleh sebagian orator disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak mencerminkan etika, santun serta menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas. Masih ada selentingan-selentingan kalimat yang menghina atau mencela dengan penuh emosi yang membara. *Ketiga*, indikasi menggiring politik agama menjatuhkan pilihan kepada calon Gubernur Jakarta beragama Islam serta isu primordialisme

masih nyaring terdengar. Jika pergolakan politik sektarian ini tidak dikelola dengan baik, arif, dan bijak maka potensi kekerasan komunal-horisontal bisa terjadi, dan spirit demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah-payah oleh kekuatan rakyat tahun 1998 bisa terkubur di kemudian hari.

Sejauh ini, kenyataan politik di Indonesia pasca reformasi masih didominasi oleh sektarianisme yang menihilkan perspektif kelas dalam gerak dan wacananya. Artikulasi Islam politik di Indonesia dewasa ini masih belum banyak menyentuh persoalan yang menyangkut kehidupan dan penderitaan umat sehari-hari. Sebagai ilustrasi, politik di Indonesia belum banyak tampil di depan dalam berbagai permasalahan umat seperti perampasan tanah, penggusuran, penolakan terhadap reklamasi pantai, perjuangan upah layak, dan sebagainya. Dalam ranah keseharian, banyaknya kelompok-kelompok pengajian dan majelis taklim dari ruang-ruang kantor hingga pemukiman nyatanya cenderung belum berkontribusi untuk membangun keterorganisasian umat secara ideologis. Formasi isu dari berbagai kelompok dan organisasi Islam masih cenderung dipimpin oleh minat di seputar *hablumminallah* dan belum banyak mengakar dalam hal *hamblumminannas*. Padahal, problem tersebut merupakan problem aktual yang hadir membelenggu umat, yang mayoritas, yang dipinggirkan dan dimiskinkan.

Harapan menjadi pembela umat yang tersingkir sebagaimana spirit Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, pergolakan politik hari ini masih lebih banyak mengangkat isu-isu identitas dan sentimen sektarian. Ini menjadi problem serius bagi agama dan politik di Indonesia yang indikatornya dapat dilihat pada menguatnya berbagai organisasi Islamis pasca reformasi. Artinya, konsepsi Islam sebagai agama pembebasan kaum tertindas pun belum menjadi wajah dari berbagai organisasi Islam maupun organisasi politik secara keseluruhan.

Terkait dengan itu, aksi masa yang lalu pun lebih banyak menyuarakan tuntutan yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan pembebasan umat dari belenggu permasalahan aktual keseharian yang mencekiknya. Sebagai ilustrasi, pada aksi-aksi massa menolak reklamasi atau penggusuran misalnya, kemarahan dan keterlibatan organisasi-organisasi Islam justru tidak pernah terlihat massif. Sementara di sisi lain, umat Islam cenderung lebih mudah tergerak untuk dimobilisasi secara massif misalnya pada tuntutan pada Gubernur Non Aktif

Basuki Tjahaja Purnama terhadap penistaan agama. Memang hal ini bukan hal yang buruk, tetapi menjadi menarik karena wajah Islam yang tampil justru terlihat seperti pandang bulu dalam kemanusiaan dan solidaritas kelas, dengan batas Islam sebagai identitas, untuk menggerakkan dan memobilisasi massa.

Perlu diakui bahwa narasi sektarian masih menjadi artikulasi politik yang paling dominan dari elemen-elemen gerakan Islam yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. Dengan demikian, kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa panji Islam politik atau populisme Islam yang dibawa oleh para demonstran kemarin betul-betul progresif atau emansipatoris, bahwa seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat kemarin merupakan representasi dari kaum miskin kota dan proletariat formal dan informal, bahwa gerakan-gerakan Islam yang menjadi motor demonstrasi merupakan sebuah kekuatan. Namun demikian, kita juga tidak bisa menafikkan aspirasi kelas yang meskipun belum hegemonik turut mewarnai demonstrasi tersebut.

## **Penutup**

Jika representasi pemikiran Islam sebagai penyaji nilai-nilai, penyedia rujukan paham dan ajaran yang menolong seseorang untuk mengorientasikan dirinya di tengah dunia dan kehidupan, maka pemikiran Islam bisa dikategorikan sebagai perangkat ideologis, yaitu suatu instrumen yang melaluinya nilai-nilai, ideologi, disebarkan dan ditanamkan. Lewat pemikiran Islam, kita diarahkan untuk mengikuti pembedaan tertentu tentang yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang mulia atau terpuji dengan yang tercela atau terkutuk. Membangun orientasi hidup seperti ini adalah fungsi ideologi. Jadi kalau seperti itu, maka konsepsi pemikiran Islam, tidak berdiri sendiri, terkadang ia menjadi instrumen pendukung kepentingan kelompok tertentu untuk memuluskan agenda politik sektarian. Subjektifitas pemikiran Islam lahir sebagai respon atas realitas kehidupan masyarakat beragama yang dicoba dimainkan dengan alur politik sektarian. Begitu ramainya pergolakan politik sektarian disuarakan diruang-ruang publik, apalagi dibungkus dengan teologi agama yang beraroma eksklusif, sehingga seolah-olah jalan politik mereka merupakan representasi dari suara umat. []

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masyukri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, M. Amin. 2009. *Falsafah Kalam, di Era Postmodernisme*, Cet-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Makin. 2016. *Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia*. Yogyakarta: SUKA Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Anti Kesempurnaan: Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baedhowi. 2008. *Humanisme Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. 2004. *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Forstudia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harb, Ali. 2012. *Nalar Kritis Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hitti, Philip K. 1970. *History of the Arabs*. London: Macmillan Press.
- Idrus, Husni. 2015. *Islam Antara Agama dan Negara*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Junadi, Yudi. 2012. *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: IMR Press.
- Machasin. 2012. *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme dan Terorisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Ajaran dan Kematian Syekh Siti Jenar, Konflik Elit dan Lahirnya Mas Karebet*, Cet-24. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Muthahhari, Murtadha. 2012. *Tafsir Holistik: Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam*. Jakarta: Citra.

- Nasution, Harun. 2011. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Purnama, Fahmi Farid. 2011. "Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama", *Jurnal Al-A'raf Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 3. No. 2.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Cet-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahidin, Ahmad. 2015. "Memahami Sunni dan Syi'ah: Sejarah, Politik dan Ikhtilaf", *Jurnal Maarif, Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10 No.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an*, Cet-4. Bandung: Mizan.
- Singgih, Imanuel Gerrit. 1999. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soleh, A Khudori. 2012. *Wacana Baru Filsafat Agama*, Cet-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasin, Rahman. 2006. *Gagasan Islam tentang Demokrasi*. Yogyakarta: AK Group.